

# **Konstruksi Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Pemberdayaan Masyarakat Lorong Di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar**

**Suaib Ibrahim**  
Institut Pemerintahan Dalam  
Negeri  
suaibipdn@gmail.com

## **ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis model pemberdayaan masyarakat lorong terhadap kemiskinan perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan lingkup operasional masyarakat miskin dengan model pemberdayaan yang sesuai kebutuhan kondisi mereka. Sumber data penelitian ini adalah masyarakat yang bermukim di lorong sebagai informan sebanyak 20 orang dipilih secara acak sedangkan unsur tokoh masyarakat dipilih sebanyak 5 orang dengan pertimbangan tertentu (purposive sampel), demikian juga 3 orang dari unsur Pemerintah Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia. Hasil kajian diperoleh model pemberdayaan masyarakat lorong dalam penanggulangan kemiskinan perkotaan disimpulkan bahwa perlu dilakukan dengan langkah-langkah penetapan pengenalan wilayah kerja, sosialisasi kegiatan, penyadaran masyarakat, pengorganisasian masyarakat dan pelaksanaan kegiatan advokasi kebijakan serta politis.

**Keywords :** Pemberdayaan, Masyarakat Lorong, Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan

## **Pendahuluan**

Di era otonomi daerah sekarang ini, salah satu permasalahan yang paling mendesak adalah kemiskinan yang memprihatinkan, mengingat hal tersebut bukanlah permasalahan yang mudah diatasi karena mencakup banyak segi. Secara umum kemiskinan dan ketidakberdayaan disebabkan dua faktor utama yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu faktor internal terkait permasalahan dan kendala yang berasal dari dalam individu atau masyarakat miskin itu sendiri dan faktor eksternal berasal dari luar individu atau masyarakat miskin.

Pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013) adalah proses perubahan sosial, ekonomi dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan masyarakat melalui proses pembelajaran bersama yang partisipatif, agar terjadi perubahan perilaku pada diri semua stakeholders (individu, kelompok, kelembagaan) yang terlibat dalam proses pembangunan, demi terwujudnya kehidupan yang semakin bedaya, mandiri, dan partisipatif yang semakin sejahtera secara berkelanjutan.

Berdasarkan potret Kota Makassar 2015 yang diterbitkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Makassar kerjasama Badan Pusat Statistik Kota Makassar, bahwa Kota Makassar pada tahun 2014 mencapai IPM 79,35 tergolong tinggi, memberikan gambaran bahwa pemberdayaan masyarakat secara umum telah banyak dilakukan di Kota Makassar. Sejalan dengan hal tersebut fakta menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa warga miskin terutama masyarakat yang bermukim di lorong-lorong.

Pemberdayaan masyarakat lorong di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar sangat menarik dan unik bila dilihat dari aspek lokasi, hal ini sangat dekat dengan pusat bisnis yaitu Makassar Mall sebagai sentra perdagangan terbesar di Kota Makassar dan Sulawesi Selatan bahkan Kawasan Timur Indonesia yang berpotensi memberikan dampak sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. Namun realitanya berbanding terbalik dengan masih adanya masyarakat miskin dilorong - lorong dekat pusat bisnis tersebut.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat lorong dibalik kemiskinan yang melilit kehidupan mereka sekaligus bertujuan mendapatkan keterangan ilmiah sekaligus menganalisis penyebab dari kemiskinan dengan menemukan pola strategi atau model pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat lorong tersebut, sehingga pemberdayaan ini mereka dapat lepas dari kemiskinan yang melilit kehidupan masyarakat lorong di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan lingkup operasional meliputi konsep utama adalah mengungkap mengapa masyarakat lorong tersebut miskin dan nilai-nilai yang dianut di balik kemiskinan mereka serta strategi atau model pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan kondisi mereka. Sumber data penelitian ini adalah masyarakat lorong sebagai informan yang tergolong miskin 20 orang tersebut dipilih secara acak dari data Kelurahan Ende yang selama ini menerima Program Beras Miskin (Raskim). Untuk unsur toko masyarakat dipilih sebanyak 5 orang dengan pertimbangan tertentu (*purposible sampel*), demikian juga sebanyak 3 orang dari unsur Pemerintah Kelurahan Ende dan Kecamatan Wajo Kota Makassar.

Teknik pengumpulan data dan Instrumen penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi tentang penyebab kemiskinan dan nilai-nilai yang dianut serta pemberdayaan masyarakat lorong digali oleh peneliti sebagai *human instrumen*, melalui teknik wawancara mendalam terhadap para informan. Teknik kedua yang digunakan adalah observasi terhadap perilaku atau tindakan dan sikap masyarakat miskin tersebut serta teknik dokumentasi untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dan peran toko masyarakat.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang berupa cerita rincian informasi yang menjadi subjek penelitian sesuai dengan ungkapan atau pandangan mereka apa adanya termasuk data hasil-hasil observasi tanpa ada komentar, evaluasi dan interpretasi namun berupa pembahasan diskusi data temuan dengan teori yang digunakan. Oleh Karena itu, maka analisa data pada penelitian ini berproses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. Proses analisa data dilakukan pada saat peneliti menetapkan fokus, permasalahan, dan lokasi penelitian yaitu individu sebagai anggota masyarakat yang bermukim di lorong-lorong khusus di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia yang masuk kategori miskin.

## Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi Kota Makassar dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi yang tidak terlepas dari pengaruh perkembangan ekonomi secara nasional dan global. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Makassar sebesar 9,83 persen, kemudian tahun 2011 naik menjadi 10,36 persen dan tahun 2012 mengalami perlambatan menjadi 9,64 persen. Hal yang sama juga berlaku pada tahun 2013 yang melambat pada angka 8,55 persen dan terakhir tahun 2014 menjadi 7,39 persen.

Pengukuran kemiskinan pada tulisan ini menggunakan konsep dari Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis

kemiskinan. Dalam 3 tahun terakhir, penduduk miskin Kota Makassar mengalami penurunan, walaupun sebelumnya sempat mengalami peningkatan. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin sebanyak 66.900 jiwa bertambah menjadi 78.700 jiwa tahun 2010. Kemudian setelah tahun 2010 mengalami penurunan hingga tahun 2013, yaitu dari 78.700 jiwa tahun 2010 turun menjadi 66.400 jiwa tahun 2013.

Batas garis kemiskinan penduduk Kota Makassar mengalami kenaikan seiring dengan meningkatnya harga kebutuhan makanan dan non makanan penduduk. Pada tahun 2008, batas garis kemiskinan penduduk Kota Makassar sebesar Rp 177.064 per bulan perkapita dan terus meningkat menjadi Rp. 273.231 per bulan perkapita pada tahun 2013.

Hasil wawancara diperoleh dari masyarakat lorong kategori miskin di Kelurahan Ende didapatkan bahwa mereka pasrah dari keadaan akibat ketidak mampuan dari sesi pendidikan dan pengetahuan menyebabkan pesimis dan berdampak kepada sifat malas, masyarakat lorong juga memiliki tingkat keterampilan yang sangat rendah. Bahkan dapat dikatakan bahwa mereka itu sama sekali tidak memiliki keterampilan yang dapat menopang usahanya. Pekerjaan sebagai tukang becak sudah menjadi tradisi yang secara turun-temurun diwariskan kepada anak-anaknya dan tampaknya tidak ada pilihan lain kecuali bekerja sebagai tukang becak atau sebagai pembantu rumah tangga bagi istri-istri mereka. Dengan begitu maka tingkat penghasilan mereka sangat rendah dan tingkat ketergantungan kepada orang lain sangat tinggi.

Hasil wawancara dari para informan baik toko masyarakat ibu Ketua RT setempat maupun aparat Kecamatan Wajo menyatakan kemiskinan masyarakat tersebut diakibatkan karena memiliki Sifat malas untuk mengembangkan diri menjadi maju serta tingkat keterampilan yang sangat rendah yang mereka miliki. Hal ini memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah Kota Makassar. Kekurang-berhasilan dari praktek-praktek pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kota terhadap mereka, menuntut untuk ditemukannya strategi atau model pemberdayaan yang sesuai dengan keadaan mereka itu. Perlu ada strategi pemberdayaan baru yang sesuai dengan kondisi mereka itu, untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Memperhatikan karakteristik masyarakat lorong sebagaimana diuraikan diatas, maka strategi pemberdayaan yang perlu dilaksanakan adalah pembangunan yang berpusat pada rakyat miskin tersebut.

Strategi Pemberdayaan masyarakat yang bermukim di lorong-lorong Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar yang masih berada dalam kategori miskin mempunyai sifat malas. Mereka tidak memiliki apa yang disebut oleh McLelland sebagai dorongan untuk berhasil. Bantuan-bantuan yang pernah diberikan kepada mereka baik yang berasal dari pemerintah kota maupun dari perusahaan sebagai tanggung jawab sosial dari perusahaan-perusahaan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik. Sudah banyak jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah baik berupa uang seperti yang dikenal dengan Bantuan langsung Tunai (BLT) atau dalam bentuk modal usaha tanpa angunan dengan bunga ringan.

Kendati demikian, model pembangunan yang berpusat kepada rakyat lebih menekankan pada pemberdayaan (*empowerment*). Model ini memandang inisiatif-kreatif rakyat sebagai sumber daya pembangunan yang paling utama dan memandang kesejahteraan material-spiritual rakyat sebagai tujuan yang harus dicapai oleh proses pembangunan. Kajian strategis pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik menjadi penting sebagai input untuk reformulasi pembangunan yang berpusat pada rakyat. Reformulasi ini memberikan peluang yang sangat besar bagi masyarakat untuk membangun secara partisipatif. Dalam pembangunan partisipatif, pemberdayaan merupakan salah satu strategi yang dianggap tepat jika faktor-faktor determinan dikondisikan sedemikian rupa sehingga esensi pemberdayaan tidak terdistorsi.

Salah satu faktor determinan yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah perubahan struktur sosial masyarakat dalam sistem sosial. Sistem sosial disini adalah sistem ekonomi dan politik. Dikatakan demikian karena diketahui bahwa dalam komunitas, hubungan antara individu dan masyarakat adalah transaksional, refleksif atau interaktif, sehingga komunitas dapat mempengaruhi individu. Karena itu, menjadi sangat penting untuk memahami posisi masyarakat yang opresif dalam konteks struktur sosial dan ekonomi di mana mereka hidup. Banyaknya sentra-ekonomi di kawasan Kelurahan Ende Kota Makassar merupakan bagian dari struktur

ekonomi yang sudah memberikan dampak yang luas terhadap perekonomian di Kota Makassar. Sayangnya tidak semua masyarakat di Kelurahan Ende mampu memanfaatkan peluang untuk berkiprah dibalik usaha-usaha ekonomi dalam skala yang besar. Dengan keterampilan yang rendah yang mereka miliki itu, tidak dapat mengambil bagian di dalamnya sebagai aktor-aktor ekonomi apalagi mau bersaing dengan para pengusaha atau pemilik modal.

Kondisi sebagian masyarakat yang masih saja miskin tersebut menjelaskan bahwa interaksi yang terjadi antara komunitas pedagang atau pengusaha sebagai pemilik modal dengan masyarakat yang status sosial rendah tersebut tidak terjadi secara sempurna. Dikatakan demikian, karena masyarakat miskin tersebut secara langsung atau tidak langsung hanya memperoleh manfaat ekonomi ketika ada konsumen yang ingin menggunakan jasanya sebagai tukang becak. Itu pun juga hanya terbatas pada konsumen yang juga secara ekonomi memiliki kelas yang rendah.

Hasil pengamatan peneliti memperhatikan hubungan antara pedagang atau pengusaha sebagai pemilik modal dengan masyarakat miskin di Kelurahan Ende yang sangat jauh dari konsep simbiosis mutualisme tersebut diharapkan perlu adanya peran pemerintah kota untuk menjembatani pola hubungan-hubungan mereka. Misalnya saja bagaimana supaya pihak pemodal ingin untuk memanfaatkan tenaga dari masyarakat miskin tersebut untuk dipekerjakan sesuai dengan tingkat keterampilan yang mereka miliki. Mungkin saja mereka itu hanya diposisikan sebagai buruh atau sejenisnya, sehingga keberadaan komunitas pedagang atau pengusaha itu dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat miskin. Dengan begitu, maka ada upaya dan merupakan salah satu strategi untuk memberdayakan masyarakat miskin tersebut.

Melihat keadaan masyarakat yang sulit untuk keluar dari lilitan kemiskinan tersebut diperlukan keseriusan pemerintah kota untuk mencari solusi dari permasalahan sosial yang dihadapi tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa telah banyak program-program pemberdayaan yang telah dilakukan oleh pemerintah tetapi tetap saja posisi mereka dalam kategori miskin. Bantuan-bantuan dari pemerintah, Pada program pemberian beras miskin (Raskin), Bantuan Langsung Tunai (BLT), atau melalui Program Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan, bantuan lain yang dapat dilakukan adalah dengan membuat program bantuan modal yang bergulir dan berkelanjutan. Tujuan akhir dari program tersebut adalah untuk memandirikan masyarakat miskin, sehingga sekalipun program itu tidak lagi bergulir atau sudah selesai, masyarakat sasaran tetap dapat melanjutkan usahanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka program pemberdayaan masyarakat miskin di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo Kota Makassar dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : (i) Penetapan dan pengenalan wilayah kerja; (ii) Sosialisasi kegiatan; (iii) Penyadaran masyarakat; (iv) Pengorganisasian masyarakat; (v) Pelaksanaan kegiatan; (vi) Advokasi kebijakan; (vii) Politisasi.

Penyadaran masyarakat; dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang "keberadaannya", baik sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Penyadaran masyarakat adalah bersama-sama masyarakat melakukan analisis keadaan yang menyangkut potensi dan masalah, serta analisis faktor-faktor penyebab terjadinya masalah yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya. Melakukan analisis akar-masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan. Menunjukkan pentingnya perubahan untuk memperbaiki keadaannya, termasuk merumuskan prioritas perubahan, tahapan perubahan, cara melakukan dan mencapai perubahan, sumberdaya, yang diperlukan, maupun peran bantuan (modal, teknologi, manajemen, kelembagaan, dan lain-lain yang diperlukan).

Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari berbagi pelatihan untuk menambah dan atau memperbaiki pengetahuan teknis, keterampilan manajerial serta perubahan sikap/wawasan. Pengembangan kegiatan, utamanya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan (income generating) serta perlindungan, pelestarian dan perbaikan/rehabilitasi sumberdaya alam, maupun pengembangan efektivitas kelembagaan. Kegiatan peningkatan pendapatan merupakan upaya terpenting untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang diperlukan maupun untuk meningkatkan posisi-tawar dan membangun kemandirian. Peningkatan

pendapatan, juga memiliki arti penting agar masyarakat semakin yakin bahwa peran-bantuan yang diberikan benar-benar mampu memperbaiki kehidupan mereka, minimal secara ekonomi.

Sementara itu, advokasi kebijakan; karena semua upaya pemberdayaan masyarakat (peningkatan pendapatan, penguatan posisi-tawar, dll) memerlukan dukungan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Kegiatan advokasi ini diperlukan guna memperoleh dukungan politik dan legitimasi dari elit masyarakat (aparatur pemerintah, pelaku bisnis, tokoh masyarakat, pegiat LSM, akademisi, dan lain-lain);

Langkah terakhir adalah politisasi; dalam arti terus menerus memelihara dan meningkatkan posisi-tawar melalui kegiatan politik praktis. Hal ini diperlukan untuk memperoleh dan melestarikan legitimasi dan keberlanjutan kebijakan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Politisasi ini, perlu dilakukan melalui beragam cara, seperti: (i) Menanam "virus" atau kader-kader perubahan yang memiliki komitmen untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, ke dalam jajaran birokrasi, politisi, pelaku bisnis, dan lain-lain, (ii) Melakukan "pressure" melalui media-massa, forum ilmiah, dan pengembangan "kelompok penekan" (*pressure group*); dan (iii) Melakukan kegiatan aksi nyata melalui kelompok kecil, yang menunjukkan manfaat pemberdayaan masyarakat yang ditawarkan.

Determinan kemiskinan masyarakat lorong atau faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat lorong selain karena faktor struktural juga lebih disebabkan oleh faktor kultural. Sifat malas dan cepat pasrah kepada nasib adalah determinan utama kemiskinan mereka. Dikatakan demikian karena secara struktural, pemerintah kota telah berbagai upaya yang diberikan kepada mereka supaya berdaya dalam arti ekonomi tetapi karena kultur yang dianutnya itu sehingga sulit untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Sifat malas yang sudah menjadi kebiasaan dan secara turun-temurun itu juga diturunkan kepada anak-anaknya. Pada setiap hari, mereka yang bekerja sebagai tukang becak keluar rumah untuk mencari nafkah nanti pada pukul 09.00 Wita, dan ketika peneliti menanyakan berapa penghasilannya yang didapat setiap hari. Tukang becak itu, hanya menjawab bahwa penghasilan itu tergantung kepada nasib. Kalau lagi nasib baik maka penghasilan lancar, tetapi kalau nasib buruk kadang-kadang untuk pembeli rokok pun sulit didapat. Lebih lanjut, menurutnya *rejeki* sama dengan *ajjala kamateanga* (ajal kematian) biar kita berada di mana, kalau Tuhan sudah menghendaki, maka tidak ada saling tawar-menawar. Demikian pula *rejeki* kalau Tuhan tidak memberikan pembagian ke kita maka apapun yang kita kerjakan tetap tidak akan berhasil, informan (tukang becak) itu dalam bahasa Makassar mengatakan, "*nai'ya dalleka le'bami napatantu karaeng Allahu Taala*".

Uraian informan di atas menjelaskan bahwa nilai-nilai yang mereka anut sangat sulit untuk diubah. Upaya penyadaran tentang nilai-nilai instrumental yang memandang kerja untuk kerja dan mencari nafkah yang halal sebanyak mungkin, sangat sulit untuk mereka terima. Perlu waktu yang lama dalam memberikan edukasi kepada mereka tentang nilai-nilai kerja. Pendidikan adalah salah satu alternatif untuk mengubah pandangan mereka.

Pemecahan Masalah melalui Proses Pemberdayaan (*empowerment*) mengesankan arti adanya sikap mental yang tangguh atau kuat. Menurut Rappaport (1985), praktek dan kegiatan yang berbasiskan pemberdayaan adalah bahasa pertolongan yang diungkapkan dalam bentuk simbol-simbol. Simbol-simbol tersebut kemudian mengomunikasikan kekuatan yang tangguh untuk mengubah hal-hal yang terkandung dalam diri kita (*inner space*), orang-orang lain yang kita anggap penting, serta masyarakat di sekitar kita. Elaborasi dari pemikiran tersebut, secara keseluruhan, akan dapat memperkaya dan menjiwai pemahaman global mengenai pemberdayaan sehingga akan membawa dampak yang sangat luas, baik terhadap kecenderungan primer maupun sekunder dari makna pemberdayaan.

## Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, maka dirumuskan beberapa kesimpulan yaitu: Strategi pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ende Kota Makassar, dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut: (i) Penetapan dan pengenalan wilayah kerja; (ii) Sosialisasi kegiatan; (iii) Penyadaran masyarakat; (iv) Pengorganisasian masyarakat; (v) Pelaksanaan kegiatan dan (vi) Advokasi kebijakan.

Sebagian masyarakat yang bermukim di lorong-lorong Kota Makassar tetap miskin walaupun sudah ada beberapa program pemberdayaan yang diberikan karena masyarakat lorong tersebut memiliki sifat malas dalam bekerja, serta cenderung pasrah kepada nasib. Selain itu, mereka juga memiliki tingkat keterampilan yang rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang dapat menopang kehidupan mereka. Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa saran sebagai yaitu Pemerintah Kecamatan Wajo perlu melakukan pendataan terhadap jumlah rumah tangga miskin khususnya di Kelurahan Ende, untuk kemudian mencari solusi pemberdayaan yang dapat memandirikan keluarga miskin tersebut. Pemerintah Kecamatan Wajo perlu melakukan pendataan terhadap jumlah perusahaan yang berlokasi di Kecamatan Wajo untuk kemudian mendorong perusahaan tersebut untuk melaksanakan tanggungjawab sosial mereka terhadap masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Ende tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rohim, 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata*. Skripsi. Universitas Islam Sunan Kalijaga. Yogyakarta.
- Anthony Bebbington, 2000. *Development is More Than Just Growth*, Development Outreach, Volume two, number three, Summery.
- Anonim, 2006. *Rasio Gini Kabupaten Gunung Kidul*. Diakses, 7 Agustus 2016.
- Anonim, 2015. *Kajian Sosial Ekonomi Penduduk Kota Makassar*, diterbitkan atas kerjasama Pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Bappeda Kota Makassar dengan BPS Kota Makassar.
- Chambers, Robert, 1987. *Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?, People: From Impoverishment to Empowerment*, New University Press. New York.
- Dwi Kurniawati, dkk., 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Usaha Ekonomi* (Studi pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto). *Jurnal administrasi Publik (JAP)* Vol.1 No. 4. P. 9-14.
- Faisal, Muhammad, 2012. *Etos Kerja dan Modal Sosial Usahawan Lokal dan Pendatang di Ibukota Takalar*. Disertasi. Universitas Negeri Makassar. Makassar.
- Hamidi, 2005. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Penerbit: Universitas Muhammadiyah Malang. Malang.
- Pranadji, 2003. *Transformasi Kelembagaan Tradisional Untuk Menunjang Ekonomi Kerakyatan di Pedesaan*. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1998. *Membangun Perekonomian Rakyat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumodiningrat, Gunawan, 1999. *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS*, PT Gramedia, Jakarta.
- Soegijoko dan Kusbiantoro. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*, Grasindo, Jakarta
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebianto, 2012. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Penerbit Alfabeta. Bandung.